



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692009/2025**



DS:3584-0007-5905-3572

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 01

Tanggal : 21 Februari 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 4. Kode/Nama Satker : (692009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
- Sebesar : Rp. 24.220.232.000 (DUA PULUH EMPAT MILIAR DUA RATUS DUA PULUH JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.01.WA Program Dukungan Manajemen
135.01.WA. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Jumlah Uang

Rp. 24.220.232.000
Rp. 24.220.232.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	24.220.232.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR II (136) Rp. 24.220.232.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692009/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



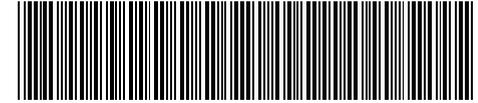
DS:3584-0007-5905-3572

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			24.220.232.000		
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum			24.220.232.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	19.852.360.000	
Rincian Output	:	01	EBA.001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah	2,00	Laporan	136.258.000	
			02	EBA.002	Layanan Kerja Sama	1,00	Laporan	51.924.000
			03	EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	9.960.000
			04	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	397.647.000
			05	EBA.959	Layanan Protokoler	1,00	Layanan	189.192.000
			06	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	120.287.000
			07	EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	18.947.092.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	479,00	Unit, m2, Paket	3.152.067.000	
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	479,00	Unit	3.152.067.000	
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	115,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	247.698.000	
Rincian Output	:	01	EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM	1,00	Layanan	23.300.000	
			02	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	114,00	Orang	224.398.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	968.107.000	
Rincian Output	:	01	EBD.001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	2,00	Laporan	409.680.000	
			02	EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	3,00	Dokumen	66.300.000
			03	EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	2,00	Laporan	193.792.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692009/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3584-0007-5905-3572

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 2

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
04	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Laporan	31.225.000
05	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	14.210.000
06	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Laporan	173.880.000
07	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan	79.020.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

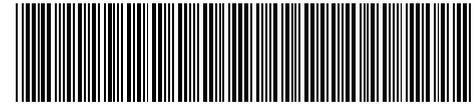
ttd.
NICO AFINTA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.01.2.692009/2025

I B. SUMBER DANA



DS:3584-0007-5905-3572

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 Kode>Nama Satker : (692009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	24.220.232.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	24.220.232.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692009/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



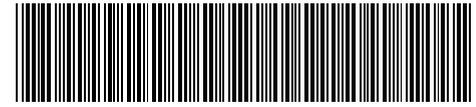
DS:3584-0007-5905-3572

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692009	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN	13.462.581	7.605.584	3.152.067	-	-	24.220.232		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.462.581	7.605.584	3.152.067	-	-	24.220.232		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	13.462.581	7.605.584	3.152.067	-	-	24.220.232		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	13.462.581	6.389.779	-	-	-	19.852.360	19 . 51	
01	RM	13.462.581	6.389.779	-	-	-	19.852.360	136@	
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	-	3.152.067	-	-	3.152.067	19 . 51	
01	RM	-	-	3.152.067	-	-	3.152.067	136@	
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	247.698	-	-	-	247.698	19 . 51	
01	RM	-	247.698	-	-	-	247.698	136@	
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	968.107	-	-	-	968.107	19 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692009/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3584-0007-5905-3572

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

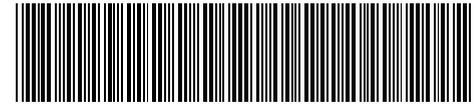
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	968.107	-	-	-	968.107	136@	
JUMLAH		13.462.581	7.605.584	3.152.067	-	-	24.220.232		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692009/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3584-0007-5905-3572

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (692009) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692009	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.871.676	2.952.306	2.325.193	2.648.998	2.461.938	2.461.938	2.089.272	468.028	468.028	468.028	1.051.406	4.953.421	24.220.232
		BELANJA PEGAWAI	1.871.676	1.993.920	1.993.920	1.993.920	1.993.920	1.993.920	1.621.254	10	10	10	20	0	13.462.581
		BELANJA BARANG	0	958.386	331.273	655.078	468.018	468.018	468.018	468.018	468.018	468.018	1.051.386	1.801.354	7.605.584
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.152.067	3.152.067
	135.01.WA.7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.871.676	2.952.306	2.325.193	2.648.998	2.461.938	2.461.938	2.089.272	468.028	468.028	468.028	1.051.406	4.953.421	24.220.232
		51 BELANJA PEGAWAI	1.871.676	1.993.920	1.993.920	1.993.920	1.993.920	1.993.920	1.621.254	10	10	10	20	0	13.462.581
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	958.386	331.273	655.078	468.018	468.018	468.018	468.018	468.018	468.018	1.051.386	1.801.354	7.605.584
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.152.067	3.152.067

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692009/2025
IV A. B L O K I R**



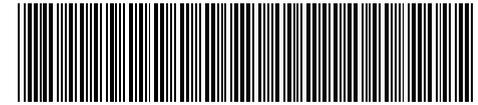
DS:3584-0007-5905-3572

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692009] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692009	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 4.953.421		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	52 Belanja Barang Rp. 1.801.354	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	53 Belanja Modal Rp. 3.152.067	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.566
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 154.715		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 364.249
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
521211	Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.750
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.884		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.152.067
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.000	521211	Belanja Bahan(RM)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.700
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.200	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Efisiensi Belanja K/L TA 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja K/L TA 2025
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692009/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3584-0007-5905-3572

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692009] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
7099.EBD	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 192.088 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.450 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.400 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.000 Efisiensi Belanja K/L TA 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 603.388 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.900 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.464 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692009/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:3584-0007-5905-3572

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [692009] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA